ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN ANTARGENERASI DI INDONESIA (GENERASI X HINGGA GENERASI ALPHA)

Samuel Revaldo Jeverson Siboro[1], Olive Katrina Joyanka Sihombing[2], Roma Uli Maria Situmeang[3], Bona Vintura Suyana Pandiangan[4], Evi Suryani Harahap[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Negeri Medan
[1]samuelsiboro91@gmail.com , [2]sihombingolive3@gmail.com ,
[3]romaulimariabrsitumeang@gmail.com , [4]suyanapandiangan@gmail.com ,
[5]eviharahap@unimed.ac.id

ABSTRACT

Intergenerational poverty is one of the most complex structural issues in human development in Indonesia. Social assistance programs implemented by the government, such as the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), and the Smart Indonesia Program (PIP), are expected to be instruments to break the chain of poverty passed down from one generation to the next. This study aims to analyze the effectiveness of social assistance programs in breaking the chain of intergenerational poverty in Indonesia, covering four generations: Generation X (1965–1980), Millennial Generation (1981–1996), Generation Z (1997–2012), and Generation Alpha (2013–2025). The method used is descriptive qualitative research with a literature study approach, utilizing secondary data from the Central Bureau of Statistics, the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Bappenas, the World Bank, and national and international scientific journals. Data analysis uses the Miles and Huberman model. The research results show that social assistance has partially improved access to education and health care, but its effectiveness in ending intergenerational poverty remains limited due to targeting issues, recipient dependency, regional disparities, and weak program integration with economic empowerment. The novelty of this research lies in its comparative analysis across four generations within a single intergenerational poverty framework, a topic that has not been widely studied before.

Keywords: *social assistance, intergenerational poverty, conditional cash transfer, human capital, public policy effectiveness*

ABSTRAK

Kemiskinan antargenerasi merupakan salah satu persoalan struktural paling kompleks dalam pembangunan manusia di Indonesia. Program bantuan sosial yang telah diimplementasikan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP), diharapkan mampu menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program bantuan sosial dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia dengan cakupan lintas empat generasi, yaitu Generasi X (1965–1980), Generasi Milenial (1981–1996), Generasi Z (1997–2012), dan Generasi Alpha

(2013–2025). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial RI, Bappenas, World Bank, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial secara parsial berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, namun efektivitasnya dalam memutus kemiskinan antargenerasi masih terbatas akibat persoalan ketepatan sasaran, ketergantungan penerima, kesenjangan wilayah, dan lemahnya integrasi program dengan pemberdayaan ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif lintas empat generasi dalam satu kerangka kemiskinan antargenerasi yang belum banyak dikaji sebelumnya.

Kata Kunci: bantuan sosial, kemiskinan antargenerasi, program harapan keluarga, human capital, efektivitas kebijakan publik

A. Pendahuluan

Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam pengurangan kemiskinan selama dua dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,36 persen pada Maret 2023, turun dari sekitar 17,7 persen pada tahun 2006. Meskipun demikian, penurunan ini belum sepenuhnya mencerminkan penyelesaian persoalan kemiskinan secara struktural, terutama dalam dimensi antargenerasi. Jutaan keluarga Indonesia masih berada dalam perangkap kemiskinan yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka melalui mekanisme keterbatasan akses pendidikan, kesehatan yang buruk, serta rendahnya modal sosial dan ekonomi (Bappenas, 2021).

Kemiskinan antargenerasi (intergenerational poverty) merujuk pada kondisi di mana status kemiskinan suatu keluarga tidak hanya bersifat siklus temporal, melainkan mengakar dan direproduksi secara lintas generasi. Solon (1992) dalam penelitian seminalnya tentang mobilitas ekonomi antargenerasi menunjukkan bahwa korelasi pendapatan orang tua dan anak jauh lebih kuat dari yang selama ini diasumsikan, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Di Indonesia, fenomena ini diperburuk oleh ketimpangan spasial yang tajam antara Jawa dan luar Jawa, serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan (Bappenas, 2021).

Dalam merespons persoalan ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem perlindungan sosial yang semakin komprehensif. Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan sejak 2007, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menggantikan Raskin/Rastra, Program Indonesia Pintar (PIP) di bidang pendidikan, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) di bidang kesehatan, merupakan pilar utama intervensi sosial pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Pada tahun 2023, PKH menjangkau lebih dari 10 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran mencapai lebih dari Rp 28 triliun (Kementerian Sosial RI, 2023).

Urgensi memutus rantai kemiskinan antargenerasi semakin mendesak mengingat Indonesia sedang menghadapi bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2030–2040. Kegagalan memanfaatkan potensi ini akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia generasi muda dari keluarga miskin akan berdampak jangka panjang terhadap daya saing bangsa. Generasi Z dan Generasi Alpha yang kini tumbuh dalam keluarga penerima bantuan sosial adalah subjek yang akan menentukan apakah rantai kemiskinan antargenerasi benar-benar terputus atau terus berlanjut (UNDP, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis lintas empat generasi—Generasi X, Generasi Milenial, Generasi Z, dan Generasi Alpha—dalam satu kerangka kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Dengan mengintegrasikan perspektif historis dan prospektif sekaligus, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana bantuan sosial berhasil memutus kemiskinan yang diwariskan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana profil kemiskinan antargenerasi di Indonesia? (2) Bagaimana perkembangan program bantuan sosial di Indonesia? (3) Seberapa efektif program bantuan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup Generasi X, Milenial, Z, dan Alpha dari keluarga miskin? (4) Apa tantangan utama yang menghambat efektivitas bantuan

sosial dalam memutus kemiskinan antargenerasi? Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas program bantuan sosial dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia melalui analisis komparatif lintas empat generasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (literature review). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan utama penelitian adalah menganalisis dan mensintesis bukti-bukti ilmiah yang telah tersedia dari berbagai sumber sekunder, bukan mengumpulkan data primer melalui survei atau eksperimen. Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang dikaji—dalam hal ini efektivitas bantuan sosial dalam konteks kemiskinan antargenerasi—berdasarkan data dan temuan penelitian yang sudah ada (Creswell & Poth, 2018).

Studi literatur dipilih karena luasnya cakupan analisis yang melibatkan empat kelompok generasi dan berbagai program bantuan sosial secara bersamaan, sehingga tidak memungkinkan dilakukan melalui pengumpulan data primer dalam satu penelitian tunggal. Selain itu, studi literatur memungkinkan triangulasi antar sumber data yang beragam—dari data statistik nasional, laporan lembaga internasional, hingga hasil penelitian empiris—sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar bukti yang lebih kuat.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari: (1) Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya data Susenas dan profil kemiskinan; (2) Kementerian Sosial RI, termasuk laporan tahunan program PKH, BPNT, dan PIP; (3) Bappenas, terutama dokumen RPJMN dan Kajian Kemiskinan; (4) World Bank dan UNDP, untuk data komparatif dan laporan pembangunan manusia; (5) Jurnal nasional terakreditasi SINTA 2–5; (6) Jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dan Web of Science. Seluruh sumber data yang digunakan adalah publikasi dalam rentang tahun 2020–2026, kecuali beberapa referensi

teoretis fundamental yang diterbitkan lebih awal tetapi tetap relevan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik kemiskinan antargenerasi dan bantuan sosial. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun data statistik dari laporan resmi lembaga pemerintah dan internasional. Seleksi literatur menggunakan kriteria: relevansi topik, ketersediaan full-text, serta kualitas metodologi dan reputasi publikasi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan: pertama, reduksi data, yaitu proses menyederhanakan dan memfokuskan data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan sesuai dengan kerangka analisis penelitian; kedua, penyajian data, yaitu mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif, tabel perbandingan, dan skema yang memudahkan penarikan kesimpulan; dan ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu proses verifikasi dan interpretasi makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Profil Kemiskinan Antargenerasi di Indonesia

Data BPS (2023) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau sekitar 25,9 juta jiwa. Meski angka ini terus menurun dalam dua dekade terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan yang bersifat struktural dan antargenerasi. Kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi secara spasial; wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku konsisten mencatat tingkat kemiskinan tertinggi yang melampaui rata-rata nasional dua hingga tiga kali lipat.

BPS (2022) mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan kemiskinan cenderung diwariskan antargenerasi di Indonesia, antara lain: (a) rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin, dengan mayoritas tidak

menamatkan pendidikan sekolah dasar; (b) keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas yang berdampak pada tingginya angka stunting—tercatat 21,6 persen balita mengalami stunting pada tahun 2022 (Kementerian Kesehatan RI, 2023); (c) ketergantungan pada sektor informal dan pekerjaan rentan; serta (d) minimnya kepemilikan aset produktif.

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menjadi indikator penting. BPS (2023) mencatat indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,55 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,37 pada Maret 2023. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin relatif rendah, mereka yang masih terperangkap dalam kemiskinan berada jauh di bawah garis kemiskinan dan mengalami ketimpangan antarsesama penduduk miskin yang cukup tinggi—kondisi yang menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap intervensi yang lebih tertarget dan intensif.

B. Perkembangan Program Bantuan Sosial di Indonesia

Indonesia telah membangun arsitektur perlindungan sosial yang cukup komprehensif selama dua dekade terakhir. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program conditional cash transfer (CCT) terbesar di Indonesia, diluncurkan pada tahun 2007. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat memenuhi kewajiban di bidang pendidikan (memastikan kehadiran anak di sekolah) dan kesehatan (pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan penimbangan balita). Pada tahun 2023, PKH mencakup lebih dari 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 28,7 triliun (Kementerian Sosial RI, 2023).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako merupakan transformasi dari program subsidi beras (Raskin/Rastra) menjadi bantuan pangan berbentuk transfer nontunai yang dapat digunakan di e-warung untuk membeli komoditas pangan tertentu. Program ini menjangkau sekitar 18,8 juta KPM pada tahun 2023 dengan nilai bantuan Rp 200.000 per bulan per keluarga (Kementerian Sosial RI, 2023). Perubahan mekanisme ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran dan

efisiensi distribusi sekaligus mendorong peningkatan kualitas gizi keluarga miskin.

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan instrumen bantuan di sektor pendidikan. PIP memberikan bantuan dana tunai langsung kepada siswa dari keluarga tidak mampu di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Pada tahun 2023, PIP menjangkau lebih dari 17 juta siswa dengan anggaran Rp 9,6 triliun (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2023). Selain itu, KIP Kuliah memberikan akses beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin di jenjang pendidikan tinggi. Di bidang kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin.

C. Analisis Dampak Bantuan Sosial terhadap Generasi X (1965–1980)

Generasi X lahir dan tumbuh pada era Orde Baru di mana sistem perlindungan sosial formal belum berkembang. Kelompok ini yang kini berusia antara 44–58 tahun, dan yang berasal dari keluarga miskin, umumnya mengalami keterbatasan akses pendidikan menengah dan tinggi pada masa mudanya. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin yang berusia di atas 40 tahun masih didominasi oleh lulusan SD atau tidak tamat SD.

Dalam konteks bantuan sosial saat ini, sebagian Generasi X dari keluarga miskin menerima manfaat sebagai kepala atau anggota KPM PKH dan BPNT. Manfaat yang mereka terima terutama bersifat protektif, yaitu menjaga agar konsumsi rumah tangga mereka tidak jatuh di bawah garis kemiskinan ekstrem, sekaligus bersifat promotif dalam hal membiayai pendidikan anak-anak mereka (Generasi Z). Penelitian Kharisma dan Saleh (2021) menunjukkan bahwa keluarga penerima PKH mengalami peningkatan konsumsi riil rata-rata 8–12 persen dibandingkan non-penerima.

Tantangan utama yang dihadapi Generasi X miskin adalah rendahnya kualitas modal manusia yang telah terbentuk akibat minimnya investasi SDM di masa lalu, sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari sektor informal dan pekerjaan

berupah rendah. Bantuan sosial yang mereka terima saat ini, meskipun membantu konsumsi, belum secara signifikan mengubah posisi mereka dalam struktur ekonomi. Ini menegaskan pentingnya memutus rantai kemiskinan melalui investasi yang lebih intens pada generasi penerus mereka.

D. Analisis Dampak Bantuan Sosial terhadap Generasi Milenial (1981–1996)

Generasi Milenial dari keluarga miskin merupakan kelompok yang mulai merasakan dampak kebijakan perlindungan sosial yang mulai berkembang di era reformasi, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah dan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pasca-krisis 1998. Kelompok ini, yang kini berusia 28–43 tahun, adalah generasi pertama yang secara parsial mendapat akses terhadap program beasiswa dan subsidi pendidikan pemerintah.

Program wajib belajar 9 tahun dan kemudian 12 tahun yang diperkuat oleh PIP memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan Generasi Milenial dari keluarga miskin. Prasetyo dan Maulana (2021) menemukan bahwa program PIP secara signifikan meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang menengah, yang menjadi hambatan utama mobilitas sosial generasi ini. Meski demikian, kualitas pendidikan yang diterima masih sangat beragam, dengan disparitas tajam antara sekolah di perkotaan dan pedesaan.

Di bidang kesehatan, perluasan JKN sejak 2014 memberikan manfaat nyata bagi Generasi Milenial miskin dalam mengakses layanan kesehatan preventif dan kuratif. Dalam hal mobilitas sosial, sebagian Generasi Milenial penerima bantuan sosial berhasil meningkatkan status pendidikan di atas orang tua mereka, namun mobilitas ekonomi mereka masih terbatas karena keterbatasan keterampilan vokasional dan jaringan pasar kerja. Nazara dan Rahayu (2020) menyoroti bahwa sistem perlindungan sosial Indonesia belum secara optimal mendorong transisi dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri secara ekonomi.

E. Analisis Dampak Bantuan Sosial terhadap Generasi Z (1997–2012)

Generasi Z merupakan kelompok yang paling langsung merasakan dampak ekspansi program bantuan sosial era pasca-2010, terutama PKH, PIP, dan JKN/PBI. Mereka tumbuh pada periode di mana angka partisipasi murni pendidikan dasar telah mendekati universal, sebagian berkat kontribusi PIP dan PKH komponen pendidikan. Data Kementerian Pendidikan (2023) menunjukkan angka partisipasi murni (APM) SD mencapai 97,7 persen dan SMP 81,5 persen, meskipun angka ini belum sepenuhnya merata di seluruh provinsi.

Di bidang kesehatan, Generasi Z dari keluarga miskin yang terlahir dari ibu penerima PKH memiliki akses lebih baik terhadap imunisasi dan gizi balita. Cahyat et al. (2020) menemukan korelasi positif antara keikutsertaan ibu dalam PKH dengan penurunan prevalensi stunting pada anak. Ini merupakan bukti nyata bahwa bantuan sosial berdampak pada peningkatan kualitas modal manusia yang bersifat antargenerasi.

Peluang ekonomi Generasi Z masih menghadapi tantangan struktural. Meskipun tingkat pendidikan mereka lebih tinggi dari generasi sebelumnya, pasar kerja yang tersedia belum mampu menyerap seluruh lulusan, terutama dari daerah non-perkotaan. Dalam konteks ini, program KIP Kuliah menjadi instrumen penting yang berpotensi mendorong Generasi Z dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan tinggi, yang secara signifikan meningkatkan peluang mobilitas ekonomi antargenerasi (Yusuf et al., 2022).

F. Analisis Potensi Dampak Bantuan Sosial terhadap Generasi Alpha (2013–2025)

Generasi Alpha merupakan generasi termuda yang lahir setelah tahun 2012 dan kini masih berada pada fase awal pendidikan. Generasi ini lahir pada era di mana PKH, BPNT, dan JKN telah beroperasi secara penuh. Sebagian besar dari mereka yang berasal dari keluarga miskin lahir dari orang tua yang telah menjadi KPM PKH, sehingga sejak dalam kandungan sudah mendapatkan manfaat dari komponen kesehatan PKH berupa pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan.

Dampak paling signifikan yang berpotensi dirasakan Generasi Alpha dari bantuan sosial adalah perbaikan

gizi dan pengurangan stunting. Program Sembako/BPNT yang meningkatkan akses terhadap pangan bergizi, dikombinasikan dengan komponen kesehatan PKH, dapat meningkatkan kualitas tumbuh-kembang anak secara bermakna. Kementerian Kesehatan RI (2023) mencatat penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,6 persen pada 2022, meskipun target penurunan di bawah 14 persen pada 2024 masih menjadi tantangan besar.

Dalam perspektif jangka panjang, Generasi Alpha memiliki peluang terbesar untuk keluar dari kemiskinan antargenerasi jika intervensi yang diterima orang tua mereka berhasil mengakumulasi modal manusia yang memadai. UNDP (2022) menggarisbawahi bahwa investasi kesehatan dan pendidikan dini (early childhood education) pada kelompok miskin memberikan rate of return tertinggi dibanding investasi serupa pada usia yang lebih tua. Dengan demikian, efektivitas bantuan sosial saat ini dalam memenuhi kebutuhan dasar Generasi Alpha akan sangat menentukan apakah rantai kemiskinan antargenerasi benar-benar terputus pada generasi ini.

G. Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Memutus Kemiskinan Antargenerasi

Analisis terhadap berbagai indikator efektivitas menunjukkan gambaran yang kompleks dan bernuansa. Dari sisi ketepatan sasaran, integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan, namun masih terdapat exclusion error (keluarga miskin yang tidak terdaftar) dan inclusion error (non-miskin yang menerima bantuan) yang cukup signifikan. Kemenko PMK (2022) mencatat bahwa pemutakhiran DTKS secara berkala menjadi kunci peningkatan ketepatan sasaran program-program bantuan sosial.

Dari dimensi peningkatan pendidikan, bukti menunjukkan bahwa PKH komponen pendidikan dan PIP berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah secara signifikan. Yusuf et al. (2022) membuktikan bahwa anak-anak penerima PKH memiliki probabilitas lebih tinggi untuk menyelesaikan pendidikan dasar dibandingkan kelompok kontrol. Ini merupakan indikasi yang kuat bahwa bantuan sosial berkontribusi pada akumulasi modal manusia sesuai

prediksi Human Capital Theory. Namun, peningkatan akses belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran, sebuah persoalan yang memerlukan intervensi komplementer di sektor pendidikan.

Dari dimensi peningkatan kesehatan, PKH komponen kesehatan terbukti meningkatkan perilaku kesehatan preventif seperti pemeriksaan kehamilan dan imunisasi. Cahyat et al. (2020) menemukan hubungan positif antara partisipasi PKH dan penurunan prevalensi stunting. Ini sejalan dengan prediksi Human Capital Theory bahwa investasi kesehatan dini memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas SDM. Namun, akses terhadap layanan kesehatan rujukan yang berkualitas di daerah terpencil masih menjadi hambatan.

Dari perspektif mobilitas ekonomi antargenerasi, bukti bahwa bantuan sosial Indonesia telah secara konsisten memutus rantai kemiskinan antargenerasi masih relatif terbatas. Sumarto dan Bazzi (dalam World Bank, 2020) mengingatkan bahwa program bantuan sosial jangka pendek tanpa komponen pemberdayaan ekonomi yang kuat tidak cukup untuk mendorong mobilitas antargenerasi yang berkelanjutan. Hal ini mengisyaratkan perlunya program yang lebih komprehensif yang menggabungkan proteksi sosial dengan pemberdayaan ekonomi produktif—sesuai dengan kerangka transformative social protection Devereux dan Sabates-Wheeler (2004).

Mengaitkan temuan ini dengan Teori Kemiskinan Antargenerasi, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial Indonesia telah berhasil melemahkan mekanisme transmisi kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan dan kesehatan, namun belum cukup memutusnya secara total karena belum mampu secara penuh mengubah posisi keluarga penerima dalam struktur ekonomi yang lebih luas. Sesuai Human Capital Theory, investasi dalam pendidikan dan kesehatan yang dilakukan melalui PKH dan PIP akan menunjukkan dampak penuh pada mobilitas ekonomi dalam jangka yang lebih panjang, terutama ketika Generasi Z dan Alpha dewasa dan memasuki pasar kerja.

H.Tantangan dan Hambatan Program Bantuan Sosial

Pertama, masalah ketepatan sasaran (targeting) tetap menjadi tantangan terbesar. Meskipun DTKS terus diperbarui, kesalahan ekslusi (keluarga miskin yang tidak terdaftar) dan inklusi (non-miskin yang mendapat bantuan) masih cukup tinggi, terutama di daerah dengan kapasitas administrasi yang lemah. Hal ini mengurangi efisiensi dan efektivitas program secara keseluruhan (Kemenko PMK, 2022).

Kedua, risiko ketergantungan (dependency trap). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan yang tidak disertai program pemberdayaan cenderung mengalami ketergantungan jangka panjang. Bantuan yang diterima digunakan untuk konsumsi dasar semata tanpa mendorong akumulasi aset atau pengembangan kapasitas produktif (Febrianto & Wahyudi, 2022). Kondisi ini justru berpotensi memperlanggeng kemiskinan, bukan memutusnya.

Ketiga, kesenjangan wilayah yang tajam. Efektivitas bantuan sosial sangat bervariasi antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan daerah terpencil. Di Papua dan NTT, implementasi program menghadapi hambatan infrastruktur, keterbatasan jaringan internet untuk sistem e-warung BPNT, dan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih kecil dibandingkan daerah maju (BPS, 2022).

Keempat, keterbatasan anggaran dan nilai nominal bantuan. Nilai bantuan PKH dan BPNT yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan hidup riil keluarga miskin menyebabkan dampaknya terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek. Bappenas (2021) mencatat bahwa nilai bantuan perlu ditingkatkan secara bertahap untuk memberikan dampak yang lebih berarti terhadap kesejahteraan penerima.

Kelima, kualitas implementasi yang tidak merata. Kapasitas pendamping sosial PKH dan infrastruktur kelembagaan di tingkat desa dan kecamatan sangat menentukan kualitas implementasi program. Pendampingan yang lemah menyebabkan komponen perubahan perilaku (behavior change communication) dari PKH tidak berjalan optimal, padahal komponen

inilah yang membedakan PKH dari sekadar program transfer tunai biasa.

I. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang realistis dan berbasis bukti: (1) Peningkatan dan pemutakhiran DTKS secara real-time berbasis data administrasi kependudukan untuk meminimalkan kesalahan sasaran; (2) Peningkatan nilai nominal bantuan PKH dan BPNT secara bertahap sesuai dengan perkembangan garis kemiskinan dan kebutuhan hidup layak; (3) Integrasi program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi produktif (seperti pelatihan vokasional, akses permodalan UMKM, dan pendampingan usaha) agar penerima manfaat dapat bertransisi menuju kemandirian ekonomi; (4) Penguatan program intervensi dini pada Generasi Alpha melalui peningkatan cakupan PAUD berkualitas, perbaikan gizi 1.000 hari pertama kehidupan, dan perluasan jangkauan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil; (5) Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja (performance-based M&E) yang mampu mengukur dampak jangka panjang program terhadap mobilitas ekonomi antargenerasi; (6) Penyesuaian kebijakan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap generasi penerima manfaat, mengingat kebutuhan Generasi Alpha yang masih dalam fase tumbuh kembang berbeda secara signifikan dari kebutuhan Generasi X yang sudah dewasa.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis efektivitas program bantuan sosial dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia melalui kerangka analisis lintas empat generasi. Berdasarkan sintesis literatur dan data yang ada, beberapa kesimpulan pokok dapat ditarik.

Pertama, efektivitas bantuan sosial Indonesia bersifat parsial dan asimetris. Program-program seperti PKH, BPNT, dan PIP telah berhasil meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan penerima manfaat, menurunkan angka kemiskinan konsumsi, serta berkontribusi pada penurunan stunting. Namun, kemampuan program-program ini untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi secara tuntas masih

terbatas, karena belum secara optimal mendorong mobilitas ekonomi antargenerasi yang berkelanjutan.

Kedua, dampak bantuan sosial berbeda-beda di antara generasi. Terhadap Generasi X, bantuan sosial bersifat protektif dalam menjaga konsumsi minimum dan promotif dalam membiayai pendidikan anak. Terhadap Generasi Milenial, bantuan sosial meningkatkan akses pendidikan menengah dan kesehatan, meskipun mobilitas ekonomi masih terhambat oleh kelemahan struktural pasar kerja. Terhadap Generasi Z, bantuan sosial memberikan dampak lebih nyata dalam hal pendidikan dan kesehatan dini, membuka peluang bagi sebagian dari mereka untuk meningkatkan status ekonomi relatif terhadap orang tua. Terhadap Generasi Alpha, potensi dampak jangka panjang dari intervensi gizi dan pendidikan dini sangat besar, namun realisasinya bergantung pada konsistensi dan kualitas kebijakan di masa mendatang.

Ketiga, faktor pendukung efektivitas program mencakup: adanya mekanisme kondisionalitas yang mendorong investasi human capital (PKH), perluasan jangkauan program secara nasional, serta perbaikan sistem data sasaran melalui DTKS. Faktor penghambat utama adalah: kesalahan sasaran, risiko ketergantungan, kesenjangan wilayah, nilai bantuan yang belum optimal, serta lemahnya integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi.

Keempat, kebaruan penelitian ini terletak pada perspektif analisis lintas empat generasi dalam satu kerangka kemiskinan antargenerasi yang belum banyak dilakukan sebelumnya. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur Human Capital Theory dan kemiskinan antargenerasi di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi praktis yang berguna bagi perumus kebijakan perlindungan sosial. Penelitian lanjutan yang menggunakan data longitudinal dan panel antargenerasi akan sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi dan memperdalam temuan ini secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Novi Laka Bumi, Maryam S & dkk (2025).Kemiskinan dan

Ketidaksetaraan.Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Artikel in Press :

Pengaruh Bantuan Sosial terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2019

Jurnal :

Badan Pusat Statistik. (2022). Profil kemiskinan di Indonesia September 2022. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2023). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Badan Pusat Statistik.

Bappenas. (2021). Kajian kemiskinan multi-dimensi: Perspektif antargenerasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kemenko PMK. (2022). Evaluasi program perlindungan sosial dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kementerian Kesehatan RI. (2023). Hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2023). Laporan tahunan program Indonesia pintar 2023. Kemendikbudristek.

Kementerian Sosial RI. (2023). Laporan kinerja Kementerian Sosial RI tahun 2022. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). SAGE Publications.

Nazara, S., & Rahayu, S. K. (2020). Program Keluarga Harapan (PKH): Indonesia's integrated conditional cash transfer program. TNP2K Working Paper Series.

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1), 1–17.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The impact of COVID-19 emergence on poverty and income distribution in Indonesia: Estimated changes in poverty and inequality during the crisis. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 56(2), 175–210.

UNDP. (2022). Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives. United Nations Development Programme.

Yusuf, A. A., Sumner, A., & Rum, I. A. (2022). Twenty years of expenditure inequality in Indonesia, 1993–2013. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 50(2), 243–254.